**EVALUASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL KORBAN BANJIR DARI**

**PERSPEKTIF PENERIMA MANFAAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG WILAYAH**

**KEDATON**

**TUGAS METODE PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**OLEH**

**ABYAS FACHRI EFENDI**

**( 2416041080 )**

**REGULER C**

****

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2025**

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

Dalam konteks studi mengenai evaluasi program bantuan sosial bagi korban banjir di area Kedaton, metode kuantitatif memfasilitasi peneliti untuk menggali sejauh mana program tersebut tepat sasaran, efektif, serta bermanfaat bagi para penerima. Data yang diperoleh dari partisipan kemudian dianalisis dengan metode statistik agar kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teori dasar memiliki peranan krusial dalam penelitian karena berfungsi sebagai fondasi konseptual. Menurut Neuman (2020), teori merupakan kumpulan proposisi yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, sehingga penelitian tidak dilakukan secara sembarangan tetapi terfokus. Teori dasar juga menjamin bahwa penelitian memiliki landasan akademis yang kuat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, teori mengenai negara kesejahteraan, penerapan kebijakan, serta evaluasi program digunakan guna memahami peran negara dalam menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak banjir. Dengan adanya landasan teori, evaluasi program bantuan sosial tidak hanya dipandang dari sudut pandang penerima, tetapi juga ditempatkan dalam konteks kebijakan publik yang lebih luas.

Selain itu, teori juga berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian kuantitatif adalah pernyataan sementara yang harus diuji menggunakan data. Berdasarkan Sekaran & Bougie (2020), hipotesis harus terhubung dengan kerangka teori, karena teori memberikan argumentasi ilmiah terhadap dugaan hubungan antarvariabel. Sebagai contoh, teori evaluasi program dari Dunn (2018) yang menekankan aspek efektivitas, efisiensi, dan relevansi menjadi pijakan dalam menyusun hipotesis terkait apakah bantuan sosial memenuhi kriteria efektif dan sesuai untuk kebutuhan korban banjir. Sementara itu, teori negara kesejahteraan memberikan landasan bahwa intervensi pemerintah melalui bantuan sosial seharusnya mampu meningkatkan kondisi sosial masyarakat yang terkena dampak. Dengan demikian, hipotesis penelitian tidak bersifat mandiri, melainkan berasal dari pemikiran teoritis yang telah terbentuk dengan baik.

Hubungan antara teori dan variabel penelitian sangatlah terkait. Dalam skripsi ini, variabel penelitian seperti efektivitas program, ketepatan sasaran, serta kepuasan penerima manfaat semuanya disusun berdasarkan teori yang relevan. Misalnya, variabel efektivitas terkait dengan seberapa baik program dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan (Dunn, 2018). Sementara itu, variabel ketepatan sasaran berhubungan dengan teori implementasi kebijakan yang diajukan oleh Van Meter & Van Horn, yang menekankan pentingnya kecocokan antara tujuan kebijakan dan kelompok yang ditargetkan. Di sisi lain, variabel kepuasan penerima manfaat dapat diuraikan melalui teori kesejahteraan masyarakat yang menempatkan fokus pada individu sebagai perhatian utama negara. Maka dari itu, setiap variabel dalam penelitian ini memiliki landasan konseptual yang kokoh, memungkinkan analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan menyeluruh.

Mengenai bencana banjir di Kota Bandar Lampung, studi oleh Agustri & Asbi (2020) menunjukkan bahwa kerentanan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan memperburuk dampak dari kejadian banjir. Hasil penelitian ini menekankan kebutuhan akan intervensi pemerintah melalui bantuan sosial, khususnya di area dengan risiko tinggi seperti Kedaton. Dengan demikian, dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya meliputi kerangka metodologis untuk penelitian kuantitatif, tetapi juga mencakup teori-teori yang substansial berkaitan dengan kebijakan publik, perlindungan sosial, serta manajemen bencana. Dengan landasan teori yang solid, penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi yang menyeluruh terhadap program bantuan sosial, sembari memberikan rekomendasi yang praktis untuk perbaikan kebijakan di waktu mendatang.

**2.1.1 Teori Negara Kesejahteraan**

Teori Negara Kesejahteraan tidak timbul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perkembangan dari pemikiran klasik mengenai tugas negara dalam melindungi warga negaranya. Di awal abad ke-20, negara-negara di Eropa Barat mulai mengimplementasikan sistem jaminan sosial sebagai upaya menangani kemiskinan dan risiko sosial. Esping-Andersen menguatkan ide ini pada tahun 2017 dengan membagi menjadi tiga jenis model welfare state: liberal, konservatif-korporatis, dan sosial-demokratik. Masing-masing model menunjukkan seberapa besar keterlibatan negara dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Di Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya mengadopsi satu model tertentu, praktik perlindungan sosial cenderung bersifat residual, di mana negara memberikan bantuan terutama pada saat masyarakat benar-benar tidak mampu atau dalam keadaan darurat, seperti bencana.

Evolusi welfare state dipicu oleh tuntutan untuk mengatasi risiko sosial yang menjadi semakin rumit, termasuk bencana alam dan perubahan iklim. Midgley menekankan pada tahun 2020 bahwa peran welfare state masa kini tidak hanya terfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga mencakup perlindungan dari risiko baru yang bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat. Ini sangat relevan dengan keadaan di Kedaton, Bandar Lampung, yang sering dilanda banjir akibat kerentanan lingkungan, pertumbuhan urbanisasi, dan manajemen ruang yang tidak memadai. Dalam situasi ini, bantuan sosial lebih dari sekedar tindakan darurat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi negara dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana yang terjadi berulang kali.

Welfare state juga menekankan pentingnya perlindungan sosial yang adil dan merata. Namun, di lapangan, sering kali muncul permasalahan terkait distribusi bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bantuan seringkali hanya menjangkau sebagian kecil dari masyarakat yang terdampak atau didistribusikan dengan cara yang tidak merata karena keterbatasan sumber daya serta birokrasi yang rumit. Permasalahan ini sejalan dengan kendala yang sering muncul dalam program bantuan sosial setelah bencana, di mana terdapat jurang antara tujuan kebijakan dengan kenyataan yang terjadi saat implementasi. Oleh karena itu, evaluasi menjadi krusial untuk mengukur sejauh mana prinsip keadilan dalam welfare state tercermin dalam implementasi kebijakan di lapangan.

Selain keadilan, aspek keberlanjutan juga menjadi fokus utama dalam teori welfare state. Program bantuan sosial seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian masalah sementara, tetapi juga harus mendorong masyarakat untuk lebih tahan terhadap risiko di masa depan. Midgley menyatakan bahwa welfare state yang ideal harus mampu membangun kapasitas masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan yang bersifat pasif. Dalam konteks Kedaton, hal ini berarti bahwa bantuan sosial setelah bencana seharusnya tidak hanya berakhir pada pemberian kebutuhan dasar, tetapi juga harus mendukung pemulihan jangka panjang, termasuk penguatan ekonomi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat terhadap fenomena banjir.

Meski demikian, konsep welfare state juga mendapatkan kritik. Beberapa pihak berargumen bahwa peran negara yang terlalu besar dalam menyediakan kesejahteraan dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah. Dalam situasi bantuan sosial untuk korban banjir, ada kekhawatiran bahwa masyarakat akan semakin kurang berinisiatif untuk meningkatkan kemandirian jika bantuan selalu tersedia. Namun, kritik ini tidak sepenuhnya mengurangi relevansi welfare state; malah, itu menyoroti perlunya desain kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk lebih mandiri.

Dalam studi ini, konsep negara kesejahteraan diterapkan untuk menganalisis bantuan sosial bagi korban banjir di Kedaton sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi warga dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh bencana. Penilaian program bantuan sosial dari sudut pandang penerima manfaat menjadi krusial, karena mereka adalah individu yang paling memahami apakah kehadiran negara telah optimal atau tidak. Dengan menggunakan pendekatan negara kesejahteraan, penelitian ini tidak hanya mengukur seberapa efektif program secara teknis, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana bantuan sosial tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara kesejahteraan: keadilan, pemerataan, perlindungan, dan keberlanjutan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspek** | **Keterangan** |
| Nama teori | Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State Theory) |
| Tokoh utama | Gøsta Esping-Andersen (2017) |
| Konsep utama | Negara memiliki tanggung jawab aktif menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemerataan sumber daya |
| Tujuan teori | Mencegah ketimpangan sosial, melindungi masyarakat dari risiko sosial seperti kemiskinan atau bencana, serta meningkatkan kualitas hidup warga negara |
| Prinsip penting | 1) Negara hadir sebagai penyedia kesejahteraan (provider) 2) Perlindungan sosial merupakan hak warga, bukan bantuan sukarela 3) Keadilan distribusi sumber daya |
| Relevansi dengan penelitian | Program bantuan sosial korban banjir di Kedaton, Bandar Lampung, merupakan manifestasi nyata peran negara dalam melindungi masyarakat terdampak bencana dan memenuhi hak dasar warga negara |

**2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan**

Teori implementasi kebijakan merupakan salah satu konsep krusial dalam studi administrasi publik. Pelaksanaan sendiri merujuk pada cara keputusan politik atau kebijakan yang telah dikembangkan dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata yang berdampak pada masyarakat (Nugroho, 2018). Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan teori ini sebagai suatu kerangka untuk mempelajari elemen-elemen yang berkontribusi pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Mereka menekankan bahwa pelaksanaan tidak hanya sekadar aspek teknis, tetapi juga melibatkan interaksi dari berbagai pihak, sumber daya, dan keadaan lingkungan.

Secara spesifik, Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi enam faktor utama yang berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Pertama, standar dan tujuan kebijakan, yang mencakup sejauh mana tujuan program dirumuskan dengan jelas sehingga dapat dimengerti oleh pelaksana dan masyarakat. Kedua, sumber daya, termasuk keuangan, tenaga manusia, serta infrastruktur yang mendukung kebijakan. Ketiga, karakteristik organisasi pelaksana, terdiri dari struktur birokrasi, kapasitas administratif, dan otoritas lembaga. Keempat, disposisi atau sikap pelaksana, yang melibatkan komitmen, motivasi, dan integritas dari aparatur dalam menjalankan kebijakan. Kelima, komunikasi antarorganisasi, mencakup kolaborasi antara lembaga pelaksana di tingkat pusat, daerah, hingga lokal. Keenam, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang bisa memperkuat atau melemahkan pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks program bantuan sosial untuk korban banjir di Kedaton, keenam faktor di atas sangat relevan. Standar dan tujuan kebijakan terlihat dalam regulasi yang mengatur penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Ketidakjelasan tujuan bisa menyebabkan kebingungan pada pihak penerima manfaat mengenai kelayakan mereka untuk menerima bantuan. Sumber daya terkait dengan adequasi anggaran, distribusi logistik, dan adanya petugas untuk menyalurkan bantuan. Karakteristik organisasi pelaksana meliputi kemampuan Dinas Sosial, BPBD, dan kelurahan dalam mendistribusikan bantuan secara efisien. Disposisi pelaksana tercermin dari dedikasi aparat untuk bersikap adil dan tidak mendiskriminasikan dalam proses penyaluran bantuan. Komunikasi antarorganisasi berfungsi untuk memastikan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat wilayah, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam bantuan. Sementara itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kedaton, yang masih ada yang rentan, berperan penting dalam sejauh mana bantuan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik.

Penerapan teori pelaksanaan kebijakan juga memberikan pemahaman mengapa masalah sering muncul dalam program bantuan sosial. Contohnya, adanya laporan mengenai bantuan yang tidak tepat sasaran dapat terkait dengan lemahnya standar kebijakan dan disposisi pelaksana. Keterlambatan dalam penyaluran bantuan kemungkinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya atau koordinasi antarorganisasi yang tidak baik. Bahkan, penolakan dari masyarakat dapat timbul jika kondisi sosial ekonomi tidak dipertimbangkan dalam perencanaan kebijakan. Dengan demikian, teori pelaksanaan kebijakan menawarkan sudut pandang analitis yang menyeluruh untuk menilai kendala maupun keberhasilan program bantuan sosial untuk korban banjir di Kedaton.

Namun, teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn juga menghadapi kritik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa teori ini terlalu mengutamakan aspek struktural dan birokrasi, sementara kurang memperhatikan faktor dinamika politik dan budaya lokal (Howlett & Ramesh, 2020). Dalam konteks Indonesia, contohnya, pelaksanaan bantuan sosial sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal atau praktik patronase yang dapat mengubah tujuan kebijakan. Sebab itu, penerapan teori ini dalam penelitian harus dipadukan dengan pemahaman kontekstual tentang dinamika politik dan sosial di Kedaton.

Selain itu, teori pelaksanaan kebijakan dapat juga dianalisis melalui pengalaman kebijakan bantuan sosial di Indonesia secara keseluruhan. Contohnya, selama masa pandemi COVID-19, program Bantuan Sosial Tunai serta Program Keluarga Harapan mengalami tantangan signifikan terkait ketepatan sasaran dan distribusi. Situasi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti standar kebijakan, sumber daya, dan komunikasi antara lembaga sering kali menjadi faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Ini sejalan dengan konteks bantuan sosial untuk korban banjir di Kedaton, di mana suksesnya distribusi bantuan sangat bergantung pada kejelasan aturan, kerjasama antarinstansi, serta kapasitas aparatur pelaksana di lapangan.

Dalam kajian ini, teori yang diajukan oleh Van Meter dan Van Horn menyediakan kerangka analisis yang relevan untuk memahami cara implementasi kebijakan bantuan sosial dilakukan di Kedaton, Bandar Lampung. Keenam faktor yang diusulkan dalam teori ini bisa berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana program bantuan sosial dapat mencapai tujuannya, khususnya dari sudut pandang penerima manfaat. Dengan mengevaluasi aspek seperti kejelasan tujuan, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, dan koordinasi antarorganisasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan menyeluruh mengenai efektivitas program bantuan sosial. Pada akhirnya, penerapan teori implementasi kebijakan mempertegas bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada desainnya, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan dan penerimaan masyarakat yang terpengaruh.

**2.1.3 Teori Evaluasi Program**

Teori evaluasi program yang diusulkan oleh Dunn (2018) menjadi dasar teori terapan dalam studi ini. Evaluasi program dimaknai sebagai proses yang terstruktur untuk menilai sejauh mana efektivitas, efisiensi, relevansi, dan keberlanjutan kebijakan publik. Evaluasi tidak hanya berfokus pada apakah sebuah program dilaksanakan, tetapi juga mengkaji sejauh mana program itu mencapai tujuan yang telah ditentukan, memberikan keuntungan yang nyata, serta memenuhi harapan masyarakat. Dari sudut pandang administrasi publik, evaluasi program berperan sebagai alat akuntabilitas masyarakat, memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar berkontribusi pada hasil yang diharapkan oleh rakyat.

Dunn (2018) menunjukkan bahwa evaluasi bisa ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, efektivitas, yang menilai sejauh mana program mencapai tujuannya yang telah ditetapkan. Kedua, efisiensi, yang membandingkan antara input (sumber daya) dan output (hasil) dari program tersebut. Ketiga, relevansi, yang menentukan apakah program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Keempat, keberlanjutan, yang menilai apakah manfaat dari program dapat dirasakan dalam jangka waktu lama. Aspek-aspek ini sangat penting untuk menilai program bantuan sosial bagi korban banjir di Kedaton, karena bantuan sosial tidak hanya sekadar distribusi barang, tetapi juga mengenai seberapa tepat bantuan itu dalam mendukung pemulihan masyarakat setelah bencana.

Dalam kerangka penelitian ini, teori evaluasi program digunakan untuk menilai pandangan penerima manfaat terhadap bantuan sosial yang mereka terima. Efektivitas diukur dari apakah bantuan benar-benar mencapai warga yang terkena dampak banjir dan memenuhi tujuan program tersebut. Efisiensi dapat dinilai melalui cara bantuan didistribusikan, apakah biaya dan waktu diminimalkan, atau sebaliknya menghampiri banyak masalah. Relevansi menunjukkan seberapa sesuai jenis bantuan dengan kebutuhan nyata masyarakat, misalnya apakah bantuan berupa makanan, pakaian, atau uang tunai benar-benar berguna untuk pemulihan mereka. Sementara itu, keberlanjutan dapat dilihat dari apakah bantuan sosial bersifat sementara atau juga membantu memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir selanjutnya.

Penggunaan teori evaluasi program juga sejalan dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. Indikator-indikator evaluasi, seperti tingkat kepuasan penerima manfaat, ketepatan sasaran, dan pencapaian tujuan program, dapat dijadikan variabel yang terukur dalam kuesioner penelitian. Misalnya, pandangan masyarakat tentang ketepatan sasaran bantuan dapat diukur lewat skala Likert, yang menghasilkan data numerik yang dapat dianalisis dengan metode statistik. Dengan demikian, teori evaluasi program bukan hanya memberikan kerangka konseptual, tetapi juga memiliki fungsi praktis untuk merancang instrumen penelitian dan menganalisis hasil yang diperoleh.

Lebih jauh lagi, teori evaluasi program terkait erat dengan prinsip negara kesejahteraan yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Jika negara kesejahteraan menekankan kewajiban negara untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, maka evaluasi program bertujuan untuk memastikan bahwa keberadaan negara tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi program berfungsi untuk menilai apakah negara telah menjalankan tugas kesejahteraannya dengan optimal atau masih menghadapi masalah. Dalam konteks bantuan sosial di Kedaton, evaluasi ini sangat krusial karena masyarakat yang menerima manfaat adalah pihak yang paling paham apakah program ini benar-benar memenuhi kebutuhan mereka atau tidak.

Oleh karena itu, teori evaluasi program yang dibahas oleh Dunn menjadi teori terapan yang paling relevan dalam penelitian ini. Teori ini bukan hanya membantu dalam menilai elemen teknis dari pelaksanaan program, tetapi juga menempatkan penerima manfaat sebagai fokus evaluasi. Ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi program bantuan sosial bagi korban banjir dari sudut pandang penerima manfaat. Melalui penerapan teori evaluasi program, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan empiris yang sah sekaligus rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki kualitas program bantuan sosial di masa depan.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti/Tahun** | **Judul Penelitian** | **Metode** | **Hasil Utama** | **Relevansi dengan Penelitian Ini** |
| 1 | Sugih Candra Kayat (2022) | Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial Bencana Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung | Kualitatif (wawancara, observasi) | Bantuan sosial berjalan tetapi terhambat distribusi dan koordinasi | Memberikan gambaran masalah implementasi bansos pascabanjir |
| 2 | Eddy Kiswanto dkk. (2021) | Implementasi dan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Program BPNT | Kuantitatif (survei 700 KPM) | Mayoritas penerima puas, tetapi masih ada kendala pencairan dan informasi | Menunjukkan pentingnya kepuasan penerima manfaat sebagai indikator evaluasi |
| 3 | Indra Nizar Purnama dkk. (2023) | Evaluasi Kebijakan Sosial Studi pada Program BPNT di Kota Serang | Kualitatif | Relevansi program cukup baik, namun efektivitas dan keberlanjutan masih lemah | Menjadi dasar teori evaluasi bansos dengan dimensi efektivitas, efisiensi, relevansi, keberlanjutan |
| 4 | Abdianor Nasrullah dkk. (2022) | Analisis Bantuan Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tanah Laut pada Masa Pandemi COVID-19 | Kuantitatif (kuesioner) | Bansos membantu konsumsi dasar, namun dampak jangka panjang kecil | Menguatkan bahwa bansos perlu dievaluasi tidak hanya jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan |

**2.3 Kerangka Berpikir**

berlandaskan pada **UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana,** serta **Permensos No. 22 Tahun 2019 tentang Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam,** yangmenjadidasar pelaksanaan program bantuan sosial bagi korban banjir di Kedaton, Kota Bandar Lampung.

Untuk mengetahui sejauh mana **program bantuan sosial bagi korban banjir di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung** mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, serta menilai tingkat **kepuasan dan manfaat nyata** yang dirasakan oleh penerima bantuan.

Faktor pendukung dan faktor penghambat program bantuan sosial korban banjir dari perspektif penerima manfaat di kota bandar lampung wilayah kedaton

Penelitian ini dilakukan di **Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung**, dengan fokus pada **program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir.**

Evaluasi program bantuan sosial korban banjir dari perspektif penerima manfaat di kota bandar lampung wilayah kedaton

**2.4 Hipotesis penelitian**

Program bantuan sosial bagi korban banjir di Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak digambarkan dalam paradigma penelitian sebagai berikut.

****

****

H1 : efektifitas dan ketepatan sasaran bantuan sosial

H2 : kepuasan dan relevansi

H3 : Efesiensi dan keberlanjutan

Y : kesejahteraan masyarakat

 : hubungan

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustri, R., & Asbi, R. (2020). Kajian kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam bencana banjir. Jurnal Kebencanaan Indonesia.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach. Routledge.

Esping-Andersen, G. (2017). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems. Oxford University Press.

Midgley, J. (2020). Social welfare in global context. SAGE Publications.

Neuman, W. L. (2020). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson.

Nugroho, R. (2018). Public policy. Elex Media Komputindo.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). Research methods for business: A skill-building approach. Wiley.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

Kayat, S. C. (2022). Implementasi kebijakan penyaluran bantuan sosial bencana banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Kiswanto, E., et al. (2021). Implementasi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap program BPNT.